

FORMULASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA PERGURUAN TINGGI PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

(Studi di Dinas Pendidikan kabupaten Jember)

Adi Wantoro¹ Itok Wicaksono²

Universitas Muhammadiyah Jember

email: adiwantoro97@gmail.com, itokwic4ksono@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dalam Formulasi Kebijakan Program Beasiswa Perguruan Tinggi Pemerintah Kabupaten Jember serta kenapa ada perubahan peraturan bupati untuk kebijakan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, sumber data yang diperoleh dari bidang sekolah menengah dan bidang perencanaan dinas pendidikan, bidang sosial budaya badan perencanaan dan pembangunan daerah, serta Ibu Lilik selaku DPRD Komisi D. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil dari pembahasan dalam Perumusan Kebijakan Program Beasiswa Perguruan Tinggi ini, dilihat dari kacamata *Multiple Streams* yang diantaranya meliputi Aliran Masalah, Aliran Kebijakan dan Aliran Politik. Dalam Perumusan Kebijakan Beasiswa S1 untuk Perguruan Tinggi di Kabupaten Jember masih terbilang kurang baik, bisa dilihat dari respon dan tindakan dari kepala daerah terhadap DPRD, serta akibat proses perumusan yang kurang baik antara kedua belah pihak hingga menimbulkan permasalahan setelah proses perumusan kebijakan selesai.

Kata Kunci: Formulasi, Kebijakan Publik, Beasiswa, Perguruan Tinggi

ABSTRACT

This study aims to find out how the process in the Formulation of the Higher Education Scholarship Program Policy for the Jember Regency Government and why there was a change in the regent's regulation for this policy. The method used in this study is a qualitative approach, the source of data obtained from the Secondary School and Planning Division of

the Education Office, the Socio-Cultural Division of the Regional Planning and Development Agency, and Mrs. Lilik as the DPRD Commission D. Data collection through interviews, observations, and documentation . The results of the discussion in the Policy Formulation of the Higher Education Scholarship Program, are seen from the perspective of Multiple Streams which include Problem Streams, Policy Streams and Political Streams. The SI Scholarship Policy Formulation for Universities in Jember Regency is still not good, it can be seen from the responses and actions of the regional head towards the DPRD, as well as the result of the poor formulation process between the two parties causing problems after the policy formulation process is complete.

Keywords: *Formulation, Public Policy, Scholarship, Higher Education*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah komponen penting yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kemajuan dan pembangunan sebuah negara. Hal ini akan menjadi prioritas sebuah negara sebab dengan adanya pendidikan menjamin warga negaranya untuk bisa berkembang dengan baik secara terstruktur, terlebih dengan adanya fasilitas pendidikan yang memadai akan membentuk sebuah karakter dan peradaban dari negara itu sendiri, namun permasalahan pendidikan di seluruh dunia masih terus saja ada dan menjadi perhatian penuh oleh pemerintah yang dinegaranya masih memiliki permasalahan tentang pendidikan. Hal tersebut sebenarnya bukan hanya menjadi masalah dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi masalah bersama yang harus bergotong

royong untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, kehadiran negara difasilitasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan kebijakannya melalui Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan tersebut adalah upaya bentuk tanggung jawab negara dalam mencerdaskan dan menjamin pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih dalam peraturan yang sama (pasal 49 ayat 1) yang mengamanatkan anggaran untuk pendidikan minimal sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan juga minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam mempercepat pekerjaan nasional khususnya bidang pendidikan, pemerintah pusat memberikan sebuah

sikap kebijaksanaan otonomi daerah dengan dikeluarkannya peraturan yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh demikian, peraturan pemerintah daerah ini membuat daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki keleluasaan dalam mengatur dan mengelola potensi daerah sesuai dengan kearifan lokal.

Namun otoritas pemerintah daerah ini tidak sepenuhnya menjadi keleluasaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola daerah kekuasaannya, masih tetap ada pembagian tugas yang menjadi wilayah pemerintah pusat. Artinya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masih tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada

bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Seperti yang disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan pembagian urusan pemerintahan yang konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Khususnya, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjelaskan pembagian sub-sub urusan ke dalam 6 (enam) urusan, mulai dari manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidikan serta tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra.

Pemerintah Kabupaten Jember adalah salah satu pemerintah daerah kabupaten yang terletak di Jawa Timur yang memiliki fokus dalam pengembangan pendidikan. Dimana terlihat dari visi, misi dan janji kerja bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang di jabarkan melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dengan visi “Jember bersatu menuju masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri” dengan janji kerja ke 2 yang akan

memberikan 5.000 beasiswa perguruan tinggi. Bantuan pendidikan perguruan tinggi ini nantinya akan diberikan secara bertahap mulai dari awal penganggaran sampai akhir anggaran (2017-2021). Pada tahun 2017 diberikan kepada 1.000 penerima bantuan perguruan tinggi dan akan terus meningkat dengan kelipatan 1.000 hingga pada tahun 2021, dengan target penerima bantuan sebesar 5.000 orang.

Dasar Pemikiran penelitian ini adalah

1) Meskipun ini adalah kebijakan yang baik untuk peningkatan sumber daya manusia dengan memperluas keterjangkauan akses bantuan pembiayaan untuk perguruan tinggi. Namun apakah program ini memang menjadi harapan oleh rakyat itu sendiri. 2) tidak konsistennya Pemerintah Jember dalam menetapkan agenda pendidikan. Dimana di RPJMD disebutkan, penerima beasiswa sampai 5.000 namun pada peraturan bupati penerima beasiswa sampai 10.000 orang penerima. Hal ini terjadi ketidak sinkronan antara RPJMD dengan peraturan bupati. 3) bagaimana bisa kebijakan tersebut berjalan dengan lancarnya, dengan adanya postur jumlah penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan RPJMD.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, berikut ini merupakan rumusan masalah:

1. Bagaimana Formulasi Kebijakan pada Program Beasiswa Perguruan Tinggi Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Kenapa bisa ada perubahan Peraturan Bupati dalam Kebijakan Beasiswa Perguruan Tinggi Pemerintah Kabupaten Jember?

Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, peneliti hendak bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pola Formulasi Kebijakan pada Kebijakan Beasiswa Perguruan Tinggi Pemerintah Kabupaten Jember (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember).

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih mengarahkan pada makna. Dalam hal ini makna yang ingin digambarkan peneliti adalah hal yang terkait dengan Formulasi Kebijakan tentang Beasiswa Perguruan Tinggi Pemerintah Kabupaten Jember, dengan pemfokusan penelitian di perumusan kebijakan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Jember serta Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Sumber Data

Sumber data adalah bagian dari subjek dari mana asal data diperoleh. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber maka ditetapkan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data bersumber dari responden secara langsung melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan objek yang diteliti.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan bagian dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Badan Perencanaan dan

Pembangunan Kabupaten Jember, serta Komisi D DPRD Kabupaten Jember.

2. Observasi

Melihat suatu perilaku dan makna yang terkandung didalamnya.

Pengamatan dilakukan dengan melihat naskah akademik dari Perbub Jember dan pendapat dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember, serta Komisi D DPRD Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri merupakan sebagai alat pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

III. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori *Multiple Streams* dari John W. Kingdon, dimana dalam melihat fenomena kebijakan publik menggunakan pendekatan Aliran Masalah, Aliran Kebijakan, Aliran Politik dan proses penggabungan aliran-aliran menjadi Jendela Kebijakan yang didorong oleh Pengusaha Kebijakan.

Teori pendukung untuk memperkuat dalam analisis penelitian ini menggunakan teori Sistem Politik dari David Easton, dimana hasil output akan menjadi umpan balik terhadap input untuk mendapat tuntutan dan dukungan agar masuk ke

dalam proses sistem politik, sampai menjadi output dalam bentuk keputusan, kebijakan dan pelaksanaan.

Aliran Masalah

1. Evaluasi Kebijakan Sebelumnya

Terkait dengan evaluasi kebijakan sebelumnya dan besaran dana Program Beasiswa Pendidikan Tinggi, evaluasi kebijakan pendidikan pada masa kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Jember periode sebelumnya masih belum terlihat keseriusan dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam pendidikan tinggi untuk pelajar-pelajar di Kabupaten Jember, bisa terlihat dari kebijakan yang diambil saat itu, dimana pemerintah daerah tidak memprogramkan bantuan dana atau beasiswa untuk membantu pelajar sekolah lulusan tingkat atas atau kesetaraan lainnya serta mahasiswa dalam pendanaan biaya pendidikan di perguruan tinggi.

2. Anggaran dalam Kebijakan

Berbicara tentang kebijakan publik pasti tidak akan jauh-jauh juga akan membicarakan pendanaan atas program yang akan dijalankan, sebab anggaran merupakan bagian sentral dari kegiatan pemerintah. Anggaran menjadi masalah khusus. Terkadang kondisi anggaran bertindak sebagai pendorong munculnya serangkaian proposal alternatif. Di lain waktu, anggaran bertindak sebagai kendala.

Hasil yang didapatkan peneliti dilapangan menunjukkan kebijakan pendidikan saat itu masih mengikuti urusan konkuren pemerintahan, membuat Pemerintah Kabupaten Jember terkesan mencari batas aman atau bermain dengan kualitas standart. Padahal urusan pemerintahan nasional sifatnya integral yaitu pemerintah daerah ikut mensukseskan kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam mendukung kebijakan pusat diperlukan inovasi tersendiri dalam mencari sumber anggaran yang sah untuk membantu pendanaan pendidikan perguruan tinggi.

Aliran Kebijakan

1. Komunitas Kebijakan

Komunitas kebijakan terdiri dari para ahli atau spesialis dalam bidang kebijakan tertentu, seperti spesialis perlindungan lingkungan, peradilan pidana, kesehatan, perumahan dan lainnya. Para spesialis kebijakan ini tersebar baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Hasil temuan peneliti dalam komunitas kebijakan ini terdiri dari dua komunitas, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Dimana dinas pendidikan berperan sebagai pembuat proposal beasiswa perguruan tinggi, sebab

perumusan kebijakan daerah di bidang pendidikan menjadi fungsi dari keberadaan dinas pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Komunitas kebijakan selanjutnya ditempati oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Dalam Perbub No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten, menunjukkan bahwa Bapekab berperan sebagai penyaring agar tetap menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran agar tidak melebihi dari yang sudah ditetapkan.

Aliran Politik

1. Suasana Hati Publik

Mendengarkan dan menilai suasana hati konstituen adalah proses yang tidak bisa dilepaskan di dalam proses mencari suasana hati publik. Pola komunikasi dua arah adalah pola yang baik dalam memfasilitasi untuk mencari *win win solution*.

Sama halnya, ketika proses kampanye dari pasangan calon nomor urut 2 dr. Faida dan Kyai Muqit yang mengusung “*Jember Maju Iptek dan Imtak*”. Dimana dulu,

ketika proses untuk mencari suasana hati publik, partai dan tim pendukung mencari ke seluruh pelosok desa, sampai alternatif solusi bisa diberikan sebagai daya tawar politik terhadap fasilitasi atas aspirasi masyarakat. Hingga pada akhirnya menawarkan janji program kerja dalam pendidikan dengan mengkampanyekan memberikan 5000 beasiswa perguruan tinggi.

2. Membangun Konsensus dalam Aliran Politik

Jika dalam aliran kebijakan membangun konsensus dengan cara persuasi, maka dalam aliran politik pembangunan konsensus dengan cara tawar-menawar. Di sini, koalisi dibangun melalui pemberian konsesi sebagai imbalan atas dukungan koalisi.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa DPRD setuju dengan program beasiswa perguruan tinggi yang di sodorkan oleh bupati, namun dengan beberapa pertimbangan yang di usulkan oleh Komisi D DPRD yang mengurus soal pendidikan.

3. Pemerintahan dalam Aliran Politik

Hasil pemilihan kepala daerah di Jember tahun 2016 mengasilkan kepala daerah yang baru, yang artinya pembangunan di Kabupaten Jember juga akan memiliki wajah yang baru, khususnya kebijakan di pendidikan.

Setelah kepemimpinan Bupati Kabupaten Jember berpindah tangan ke dr. Hj. Faida, MMR, prioritas kebijakan berubah dengan implikasi menciptakan kesempatan untuk mendorong beberapa proposal prioritas bupati dan mengubur proposal lainnya. Awal perumusan Perda RPJMD ini adalah sebagai awal perpecahan antara bupati dan DPRD. Padahal ini adalah pertemuan perdana dengan DPRD pasca bupati terpilih, tetapi karena tingginya tensi politik menyebabkan bupati bertindak dengan upaya menekan DPRD dengan cara melaporkan DPRD dengan berbagai tuduhan sampai ketua DPRD dipanggil oleh kejaksaan. Upaya tersebut agar legislatif menyetujui proposal yang dibawa oleh eksekutif.

Dengan begitu DPRD Kabupaten Jember mencoba untuk mengalah, sebab atas dasar pertimbangan kelanjutan pembangunan daerah maka DPRD Kabupaten Jember setuju dan mengesahkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, sampai pada bupati membuat Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau Kesetaraan di Kabupaten Jember.

Sistem Politik Kebijakan Beasiswa S1 Kabupaten Jember

Atas dasar tekanan dalam anggota sistem politik pada saat perumusan kebijakan oleh eksekutif terhadap legislatif menimbulkan keputusan kebijakan yang tidak bisa mengakomodir tuntutan-tuntutan dari sebagian anggota dalam sistem politik yang berakibat terkikisnya dukungan legislatif kepada eksekutif.

1. Lingkungan

Berkaitan dengan Kebijakan beasiswa S1 ini diharapkan akan mampu menyelesaikan masalah sistem ekonomi, sistem kepribadian dan sistem budaya politik. Sebab, dengan mahalnya biaya pendidikan diharapkan dengan kebijakan beasiswa S1 ini akan membantu meringankan perekonomian masyarakat dengan biaya pendidikan yang disubsidi oleh pemerintah, maka dengan beasiswa ini bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membentuk karakter bangsa. Oleh sebab itu, berdampak pada sistem budaya politik yang menganggap bahwa kebijakan yang di buat oleh bupati sangat berdampak besar dan bermanfaat.

Beasiswa S1 dianggap penting bagi pemerintah itu sendiri, sebab di dalam sebuah program pemerintah yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan masalah pemerataan akses dalam pendidikan perguruan tinggi. Sebab dengan

meningkatkan jumlah penerima beasiswa berarti Pemerintah Kabupaten Jember juga berupaya meningkatkan sumberdaya manusia (SDM) di masyarakat Jember, sebagai upaya menyongsong kompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2. Input

Input sangat terkait dengan tuntutan (*Demands*) dan dukungan (*Support*) yang bisa berasal dari dalam sistem politik maupun luar sistem politik. Seperti dalam upaya bupati untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa S1 ini tidak berhenti disitu saja. Strategi penambahan kuota penerima beasiswa S1 untuk perguruan tinggi ini memang sudah direncanakan. Tuntutan (*Demands*) yang berasal dari dalam sistem politik atau dari DPRD Kabupaten Jember sudah tidak dihiraukan lagi oleh Bupati, oleh karena itu bupati kehilangan sebagian dukungannya dari legislatif. Namun upaya yang dilakukan bupati mencari dukungan (*Supports*) dari luar sistem politik, yaitu suara masyarakat atau kontituennya, dengan upaya meningkatkan jumlah pemerima beasiswa S1.

Output

Karena sikap *Apriori* (pengetahuan yang ada sebelum ketemu pengalaman) yang ditunjukkan oleh DPRD Kabupaten Jember saat itu, terbentuk kebijakan baru

dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021. Sehingga memberikan jalan yang mulus bagi bupati untuk merubah juga Peraturan Bupati yang lama tentang beasiswa perguruan tinggi dengan Peraturan Bupati yang baru dalam Perbub Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kepada Lulusan SMA/SMALB/MA/SMK Negeri atau Swasta atau Kesetaraan di Kabupaten Jember.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa Perumusan Kebijakan Beasiswa S1 untuk Perguruan Tinggi di Kabupaten Jember masih terbilang kurang baik, bisa dilihat dari respon dan tindakan dari kepala daerah terhadap DPRD, serta akibat proses perumusan yang kurang baik antara kedua belah pihak hingga menimbulkan permasalahan setelah proses perumusan kebijakan itu sendiri. Fenomena ini dapat di lihat dari segi teori *Multiple Streams* yang terdiri dari:

1. Aliran Masalah

Evaluasi kebijakan pendidikan pada masa kepemimpinan kepala daerah Kabupaten Jember periode sebelumnya masih belum terlihat keseriusan dalam pemerataan akses pendidikan, khususnya dalam pendidikan tinggi, bisa terlihat dari kebijakan yang di ambil tidak ada yang mengena terkait subsidi pendidikan untuk perguruan tinggi.

2. Aliran Kebijakan

Komunitas kebijakan terdiri dari dua unsur dimana yang pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berperan sebagai perumus atas proposal kebijakan beasiswa perguruan tinggi dan kedua Badan Perencana dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai penyaring atas proposal tersebut agar tetap sesuai dengan konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.

3. Aliran Politik

Perdebatan antara DPRD dan kepala daerah disini sangat alot, dimana saran dan pendapat dari DPRD susah untuk diterima oleh kepala daerah yang lebih bersifat otoriter, sehingga terjadi proses saling menekan satu sama lainnya. Hingga konsekuensi yang timbul atas tidak sempurnanya proses perumusan kebijakan beasiswa perguruan tinggi dalam aliran politik ini, mengakibatkan pola komunikasi antara kedua belah pihak tidak terbangun dengan baik dan timbul permasalahan selanjutnya.

Saran

1. Pemerintah

Saran peneliti kepada Pemerintah Kabupaten Jember, baik itu kepala daerah dan DPRD harus membangun pola komunikasi yang baik, saling menghargai tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tercipta keharmonisan pemikiran dan perasaan untuk perumusan kebijakan yang nantinya berdampak untuk masyarakat Jember. Sebab dampak yang timbul dari tidak sempurnanya dalam perumusan kebijakan beasiswa perguruan tinggi menimbulkan masalah pelaksanaan yang kurang baik dan masalah-masalah lainnya.

2. Penelitian Berikutnya

Saran peneliti terhadap para akademisi kebijakan publik, khususnya program studi ilmu pemerintahan, jika ingin meneliti suatu kebijakan publik cobalah menggunakan teori *Multiple Streams*. Teori ini memiliki kelebihan untuk memberikan perspektif keilmuan dengan sudut berbeda, seperti dapat melihatkan bagaimana cara dan peran aktor memainkan polanya di setiap aliran di dalam kebijakan publik. Teori ini populer di luar negeri, namun belum populer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y., and Yudi Rusfiana. 2016. *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Pdf. BANDUNG: ALFABETA, CV.
- Aliyyah, Rusi Rusmiati, Unifah Rosyidi, and Rugaiyah Rugaiyah. 2019. "Higher Education Scholarship: Gate To Develop Educational Human Resource Quality." *International Journal for Educational and Vocational Studies* 1(4): 349–58. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i4.1501>.
- Block, N. T. 2007. 58 Psychiatric Services *Handbook of Public Policy Analysis*. ISBN. eds. Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney. New York: CRC Press.
- Brodkin, Evelyn, and John W. Kingdon. 1985. 100 Political Science Quarterly *Agendas, Alternatives, and Public Policy*. 2nd ed. Pearson.
- Dewi Fitri, Dahlena. 2017. "JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017 Page 1." *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM SEKTOR PENDIDIKAN: (BANTUAN BEASISWA TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013-2016)* 4(1): 1–13. [https://media.neliti.com/media/publications/183768-ID-partisipasi-](https://media.neliti.com/media/publications/183768-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-pelaksanaan.pdf)
- masyarakat-dalam-pelaksanaan.pdf.
- I Nyoman Andry, Christian, Piers Andreas Noak, and Purnamaningsih Putu Eka. 2017. "Kabupaten Jembrana Terkait Pemberian Beasiswa Strata-1 Dalam Upaya Meningkatkan." *Citizen Charter* 1: 1–12.
- Khaidir, Afriva, and Margaret Sutton. 2017. *PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Dan Implementasi Dalam Bidang Pendidikan*. Indonesia.
- Li, Hui, and Lu Jiaqing. 2018. "Children and Youth Services Review." *Legislation for early childhood education: A case study of China* (xxxx): 1–15.
- Mintrom, Michael, and Sandra Vergari. 1996. "Advocacy Coalitions, Policy Entrepreneurs, and Policy Change." *Policy Studies Journal* 24(3): 420–34.
- Turnpenney, John R, Andrew J Jordan, David Benson, and Tim Rayner. 2013. "The Tools of Policy Formulation : An Introduction." : 3–30.
- Bogdan, Robert C, and Knopp Sari Biklen. *Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods; Allyn and Bacon*. Boston London, 1982.
- Dr. Sahya Anggara, M.Si. *Sistem Politik Indonesia*. 1. Edited by M.Si. Drs.

Beni Ahmad Saebani. Bandung,
Indonesia: Pustaka Setia, 2013.

Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods
in Social Research*. New York: Mc
Graw Hill, 2002.

Marshall, Catherine, Gretchen B Rossman.
Designing Qualitative Research.
Second Edition . London:
International Educational and
Profesional, 1995.

Sugiyono. *Memahami Penelitian
Kualitatif*. Bandung: Alfabeta,
2005.

— . *Memahami Penelitian Kualitatif*.
Bandung: Alfabeta, 2005.

